

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SUNGAI PENUH**

**RADI ELFIANDI**

STIA Nusantara Sakti Kota Sungai Penuh

Email:

[radiefiandi2402@gmail.com](mailto:radiefiandi2402@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the Implementation of Gender Responsive Planning and Budgeting Policies in the Women's Empowerment and Child Protection Service in the City of Sungai. This study uses a type of qualitative research with a purposive sampling technique as a determinant of research informants. The results showed that the implementation of Gender Responsive policies at the Women's Empowerment and Child Protection Service in Sungai Full City through indicators, namely: 1) communication 2) resources 3) disposition and 4) bureaucratic structure showed quite well. This can be seen from the good communication made by the Women's Empowerment and Child Protection Office.

**Keywords:** Implementation, policy, Gender Responsive

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling* sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan responsif gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota sungai penuh melalui indikator, yaitu : 1) komunikasi 2) sumber daya 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang di lakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah baik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Responsif Gender

### **I. PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok, atau pejabat-pejabat pemerintah atau Swasta yang diarah pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan - tujuan yang ingin dicapai (Agustino,2017:139). Proses implementasi dapat terjadi seketika, tetapi kebanyakan harus menunggu karena memerlukan persiapan yang cukup matang.

Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang mewarnai berbagai kebijakan di setiap bidang pembangunan. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan merupakan usaha yang sinergis yang diarahkan dan tercermin pada keluaran kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan mencakup ke dalam tiga perjuangan pembangunan besar yaitu: (1) Pembangunan demokrasi politik, (2) Pembangunan demokrasi ekonomi dan (3) Pembangunan karakter dan kegotongroyongan. Kebijakan pengarusutamaan pelaksanaan pembangunan perlu pula dilakukan dengan pendekatan lintas bidang. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam pembangunan bersifat kompleks, bukan terfokus pada bidang tertentu saja. Dengan kata lain penanganannya perlu ditangani dilakukan secara holistik sehingga hasilnya dapat menyelesaikan persoalan dengan tepat sasaran.

Kebijakan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria: (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) Pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan yang signifikan; dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor yang terkait, tetapi diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung.

Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap program/kegiatan dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan terlebih dahulu perlu melakukan analisis kebutuhan gender/ analisis gender. Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis gender lainnya. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Contoh kasus yang pernah terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Sungai Penuh diantaranya, kurangnya komitmen aparat pemerintah yang dikarenakan masih rendahnya pemahaman terhadap makna PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender), masih lemahnya kinerja bagian yang terkait langsung yang membidangi perempuan dan anak, kurangnya peran masyarakat dan serta sarana prasarana pendukung.

Pemerintah kota sungai penuh tahun anggaran 2022, rencana kerja dan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah didinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh dan ringkasan dari keseluruhan perubahan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah, total *surplus/(deficit)* sebelum perubahan = **4.308.003.836**, setelah perubahan = **4.308.003.836**.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan menjadikannya sebagai strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal. dikarenakan kurangnya SDM yang mampu melaksanakan PUG melalui PPRG serta masih minimnya penentu kebijakan yang paham tentang PUG melalui PPRG sebagaimana dimaksud. Tulisan ini akan mengkaji tentang penerapan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelaksanaan implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota sungai penuh.?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota sungai penuh.

### **1.3 Tinjauan Pustaka**

Nurdin Usman (2002:70) menyatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

### **Teori Implementasi Kebijakan Edward III**

Implementasi menurut Edwards III diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*).Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Brighman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

## **Responsif Gender**

Isu gender tidak hanya terfokus pada perbedaan capaian kinerja antara laki-laki dan perempuan tetapi juga terkait dengan isu lain seperti kemiskinan dan ketertinggalan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi masalah yang masih berat. Kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk kaya dan miskin masih lebar khususnya untuk jenjang SMP/MTs ke atas. Bahkan semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin lebar kesenjangannya. Hal yang sama terjadi pada kemampuan keaksaraan. Angka melek aksara penduduk miskin masih jauh lebih rendah dibanding penduduk kaya, dan dari data terungkap bahwa penduduk miskin yang buta aksara umumnya juga penduduk perempuan. Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan juga masih mengemuka. Semua capaian kinerja pendidikan mengungkapkan bahwa kinerja di wilayah perkotaan lebih baik dibanding wilayah perdesaan. Sehubungan dengan itu perlu upaya serius agar seluruh komponen pembangunan pendidikan menjadi responsif gender. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender. Momentum penting pelaksanaan perencanaan dan penyusunan anggaran responsif gender di Indonesia terjadi ketika Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9/2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga di tingkat pengarusutamaan gender.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Metode penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1 Pendekatan penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2003:4), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sementara itu, menurut Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive Sampling, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

#### **2.1.2 Lokasi penelitian**

Lokasi yang akan digunakan untuk tempat Penelitian adalah lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) di Kota Sungai Penuh.

#### **2.1.3 Jenis dan sumber data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (suharsimi Arikunto, 2010:172). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literature lain (Lexy meleong, 2005:157). Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah, yaitu. Data primer dan data sekunder.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam rangka pelaksanaan program pengurusanutamaan gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh, maka penulis akan menganalisis semua data diperoleh dari hasil penelitian seperti apa disajikan pada bagian sebelumnya. Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu kepala dnas, sekretaris dinas, kepala bidang, serta kasubbag umu dan kepegawaian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh. Data yang diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada sebelumnya, baik melalui wawancara maupun dokumentasi serta catatan-catatan yang penulis dilapangan sebagai data dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sungai penuh. Dalam melakukan analisis data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

#### **1. Komunikasi**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gaffar (2009:295) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu proses kebijakan public. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak mengenai kenerja bagian yang terkait langsung yang terkait langsung yang membidangi perempuan dan anak sudah baik, yang mana komunikasi yang dilakukan adalah dengan cara selalu melakukan koordinasi dan singronisasi dengan pejabat bawahannya yaitu bidang pemberdayaan perempuan dengan perlindungan anak dan selalu bermonikasi di setiap kegiatan yang ada, dan yang terpenting selalu saling membantu disetiap pelaksanaan kebijakan pengurusanutamaan gender.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam hal pelaksanaan pengrusutamaan gender sesuai dengan ditetapkan semua telah berjalan dengan baik tetapi masih ada yang non PNS dan masih kurangnya tenaga bidang hukum psikolog. Dalam hal pemilihan Sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat bagus agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (2014:135) menyatakan bahwa Implementasikan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan program pengrusutamaan gender sesuai dengan ditetapkan semua telah berjalan dengan baik tetapi masih ada yang non PNS dan masih kurangnya bidang hukum psikolog. Dalam pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten sudah sangat bagus agar kebijakan terimplementasikan dengan baik, dan juga sarana dan prasarannya juga sudah memadai tetapi yang belum terbentuk hanya UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) masih dalam proses mengajukan agar lebih detail ke masyarakat.

### **3. Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh dalam melakukan disposisi dalam hal komitmen, sejak awal program Pengrusutamaan Gender ada, sudah berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan tersebut agar semua masyarakat terkhusus d kota sungai penuh untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender. Pengrusutamaan Gender ini adalah strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui pengintegrasian, pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan. Disposisi lain adalah untuk mengarahkan pegawai untuk brkerja sesuai dengan tapoksi nya masing-masing untuk melayani masyarakat terkhusus Pengrusutamaan Gender, pegawai kepala bidang di arahkan untuk mengkoordinasikan kemudian dilaksanakan oleh kasi dan dibantu oleh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh.

### **4. Struktur Birokrasi**

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa struktur birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik, dan Sumber Daya Manusia yang melakukan pelayanan dari program kegiatan juga sudah lebih rinci dengan struktur birokrasi yang jelas, serta dapat mudah diketahui tugas masing-masing dari bidang-bidang.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Sungai Penuh dapat di nilai dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan responsif gender, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi, berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh mengenai kinerja yang terkait langsung yang membidangi perempuan dan anak baik. Komunikasi yang dilakukan dengan cara selalu melakukan koordinasi dan singronisasi dengan pejabat bawahannya yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan selalu berkomunikasi di setiap kegiatan yang ada, saling membantu disetiap pelaksanaan kebijakan Pengurusutamaan gender.
2. Sumber Daya, berdasarkan hasil penelitian terkait Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh, baik Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan sesuai dengan kemampuan yang di tetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh sudah memadai dan mudah sangat bagus agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Walaupun masih ada yang non PNS, dan kurangnya Bidang Hukum Psikolog, Sumber Daya Dana yang sudah dialokasikan cukup untuk kebutuhan pelaksanaan program Pengurustamaan Gender, serta sarana prasarannya juga sudah memadai tetapi yang belum terbentuk hanya UPTD(Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) masih dalam proses mengajukan agar lebih detail ke masyarakat.
3. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan disposisi yang dilakukan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh sudah berkomitmen untuk menjaalakan pelaksanaan tersebut agar semua masyarakat khusus di Kota Sungai Penuh untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Adapun disposisi yang dimaksud adalah mengarahkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas nya masing-masing untuk melayani masyarakat. Terkhusus pelaksanaan program pengurustamaan gender dari Kepala Dinas ke Kabid diarahkan untuk mengkoordinasikan lalu dilaksanakan oleh kasi dan dibantu staf Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Struktur Birokrasi, berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh sudah berjalan dengan baik. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sudah mendetail antar kegiatan Responsif Gender itu sendiri menjadi jelas Sumber Daya Manusianya yang melakukan pelayanan, dan dari program perkegiatan sudah lebih rinci dengan struktur birokrasi yang jelas karena Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh bagian dari pelayanan masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada LPPM STIA nusantara sakti sungai penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS jurnal Administrasi nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Antasri,R., Hadi,A., (2017). *Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penggaran Yang Responsif Gender*.Jurnal Al-Maiyyah
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*.Yogyakarta: Alfa Beta.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* .Bandung: CV. Sinar Baru
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Edward III, George C. 1980 *Implementing Public Policy*.Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Brigman, Peter and Davis, Glyn 2008.*The Australian Policy Handbook*.Australia: Allen & Unwin
- S Wibawa.1994. *Evaluasi Kebijakan publik*.Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994
- D.ye, Thomas R (1992) “ *Understanding Public Policy*”. New Jersey : Prentice Hall
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Affan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*.Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Tangkilisin, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia